BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Hubungan Internasional

Sebagai sebuah kajian, Hubungan internasional lahir sebagai subjek akademik sekitar akhir perang dunia pertama dengan didirikannya dewan hubungan internasional *(Chair Of Internasional Relations)* di *University of Wales, Aberystwyth*, pada 1919 (Burchill dan Linklater, 2015:5). Dalam sejarah intelektul Hubungan internasional tidak bisa dipisahkan pada peristiwa Perang Dunia Pertama dimana pada masa ini, ada ambisi dari para intelektual untuk menyelesaikan konflik yang terjadi yaitu perang dunia pertama.

Sebagaimana yang diungkap oleh Burchill dan Linklater, Perang dunia pertama menjadi sebuah perhatian terutama bagi para intelektual atau sejarawan untuk mengetahui dan bagaimana serta kenapa perang itu bisa terjadi, menurutnya aktivitas keilmuan mereka dipandu oleh tujuan moral murni yaitu menemukan penyebab perang sehingga dunia dapat menghindari bencana serupa di masa yang akan datang (Burchill dan Linklater, 2015:5).

Sejarah intelektual hubungan internasional terus mengalami perkembangan hingga sekitar pasca perang dunia kedua adanya periode dekolonialisasi dimana pada periode ini munculnya negara-negara baru merdeka dan sekitar tahun 1970 negara–negara yang baru merdeka menggenjot dan melakukan perubahan dalam sistem internasional terutama untuk meningkatkan

posisi ekonomi negaranya. Selain itu terjadi perdebatan bagaimana hubungan antara ekonomi dan politik, untuk disikapi dan munculnya fenomena globalisasi (Jackson & Sorensen, 2009:78). Hal ini memunculkan agenda riset dalam ilmu ini dan menggesar kajian Hubungan Internasional dari isu–isu keamanan dan konflik ke masalah yang lebih kompleks berkaitan dengan kesejahteraan kemiskinan yaitu ekonomi politik internasional.

2.1.2 Liberalisme Institusional

Kaum liberal institusional melihat bahwa institusi internasional menolong memajukan kerjasama diantara negara-negara. Menurut kaum liberal, institusi internasional adalah suatu organisasi internasional, yang menyediakan seperangkat aturan untuk mengatur tindakan negara dalam bidang tertentu. Seperangkat aturan tersebut disebut rezim, seperti rezim perdagangan. (Jackson&Sorensen, 2007:154).

Kaum liberalis institusional beragumen bahwa institusionalisasi yang tinggi mengurangi efek yang mengacaukan. Dalam pandangan ini menurut Mearshimer institusi dibuat karena tidak adanya kepercayaan di antara negara-negara. Kaum institusionalis menekankan bahwa institusi-institusi menyediakan kesinambungan dan perasaan stabilitas. Menurut liberalisme institusional institusi internasional dapat memajukan kerjasama antar negara dan oleh karena itu membantu mengurangi kepercayaan antara negara-negara dan rasa takut satu sama lain (Jackson&Sorensen, 2007:158).

2.1.2.1 Rezim Internasional

Menurut Robert O Keohane, rezim dapat dipahami sebagai sebuah alat untuk memfasilitasi pembuatan kesepakan substantif di antara negara-negara. Rezim memfasilitasi kesepakatan melalui penyediaan aturan, norma, prinsip, dan prosedur yang membantu aktor untuk menghadapi hambatan dan halangan. Dengan demikian rezim membantu aktor-aktor yang terlibat mendapat kepentingan melalui prilaku kolektif (Rahmawati, 2012:109).

Sementara Krasner mengungkap ada 4 elemen pembagunan rezim, yaitu: Pertama, Prinsip, yaitu pernyataan yang mendasari bagaimana rezim tersebut mengatur dan memandang hubungan negara. Norma, yaitu sejumlah standar prilaku, hak dan kewajiban setiap negara. Norma dan prinsip rezim akan menjadi karakter dari rezim bersangkutan dan tidak dapat dirubah tanpa merubah sifat dasar rezim. Berikutnya berkaitan dengan aturan, beroprasi di bawah norma dan prinsip terutam untuk mengatur persoalan yang mungkin muncul diantara prinsip yang dianut dan norma yang ingin ditegakan.Terakhir adalah berkaitan dengan prosedur pengambil kebijakan, yaitu merupakan mekanisme yang penting dalam menentukan kebijakan karena dalam mekanisme ini akan ditentukan aturan yang berkaitan dengan prilaku dan kebijakan rezim, maksud dari hal ini adalah aturan baru yang di keluarkan untuk menyikapi isu baru (Rahmawati, 2012:110).

Menurut Sood ada beberapa prinsip dari perdagangan internasional yang yang diatur dalam WTO. Yaitu prinsip non- diskriminasi, prinsip resiporitas, prinsip penghapusan hambatan kuantitatif, prinsip perdagangan yang adil dan prinsip tarif mengikat. Prinsip non-diskriminasi, meliputi *most favoured nation*

dan prinsip *national treatment*. Dalam prinsip *most favoured nation* semua negara anggota harus memberi perlakuan yang sama dalam pelaksanaan kebijakan impor dan ekspor. Berikutnya adalah prinsip *national treatment* dalam prinsip ini tidak menghendaki adanya diskriminasi antar produk dalam negeri dengan produk serupa di luar negeri dan berikutnya *prinsip resiporitas*, dalam prinsip ini setiap negara harus melaksanakan kebijaksanaan internasional artinya apabila negara menurunkan tarif masuk atas produk impor disuatu negara maka negara pengekspor produk tersebut wajib juga menurunkan tarif masuk untuk produk dari negara yang pertama. Prinsip lainnya adalah prinsip penghapusan hambatan kuantitatif, prinsip perdagangan yang adil dan prinsip tarif mengikat. Ketigan prinsip tersebut masing-masing menekankan hambatan yang berkaitan dengan kuota dan pembatasan ekspor. Berikutnya melarang dumping dan subsidi (Sood, 2012:41-48).

Ada dua pandangan dalam memahami dan mempelajari rezim yaitu pandangan pertama melihat rezim internasional sebagai institusi internasional dan dan yang kedua adalah antara rezim dan organisasi internasional adalah hal yang berbeda. Pandangan pertama, yaitu rezim sebagai tumpang tindih, dalam arti rezim dan organisasi internasional digunakan secara bergantian dimana berbicara berkaitan dengan rezim hanya membahas isu-isu tertentu tetapi organisasi internasional memilik kapasitas untuk bereaksi dan bertindak atas isu tertentu. Pandangan kedua menganggap antara rezim dan organisasi adalah hal berbeda (Hennida, 20015:6).

Salah satu pendekatan dalam memahami rezim adalah pendekatan intitusionalis atau neo -liberal yang sangat menekankan pentingnya peran rezim dalam membantu negara untuk mengenali kepentingan yang sama atas isu tertentu. Dalam pandangan neo-liberal, menitik beratkan analisisnya pada analisis ekonomi yaitu pada biaya transaksi dan biaya informasi.

Robert Keohane mengungkap bahwa :

> Rezim internasional di tetapkan oleh negara untuk mencapai tujuan -tujuan dari mereka dalam menghadapi tentang dilema dan kordinasi dan kolaborasi dibawah interdependensi, pemerintah-pemerintah menuntut intitusi-intitusi internasional yang memungkinkan mencapai kepentingan mereka melalui tindakan kolektif terbatas (Suparman et.al, 2010:55).

Dalam bukunya, Regionalisme dalam studi hubungan internasional Nuraini S et.al mengungkap, ada beberap argumen pokok berkaitan dengan pendekatan institusionalisme. Pertama, dengan semakin tinggi interdependensi semakin tinggi pula tuntutan untuk melakukan kerjasama, dalam hal ini negara akan mampu memberikan solusi terhadap berbagai permasalahan secara bersama. Maka dibentuklah norma, aturan dan institusi-institusi. Berikutnya, adalah berkaitan dengan keberadaan insitusi-institusi yang begitu penting karena akan mampu memberikan keuntungan dan pengaruh terhadap aktor lain. Keuntungan tersebut bisa berupa ketentuan informasi, transparasi dan monitoring, pengurangan biaya transaksi, pengembangan ekspektasi yang sama dan memfa-silitasi penggunaan produktif dari berbagai strategi yang terkait dengan isu- isu yang dihadapi bersama (Suparman et.al, 2010:55).

Sementara menurut Abbot et.al ada tiga komponen karakteristik dari rezim yaitu, *pertama* adalah kewajiban setiap aktor baik negara maupun non-negara

terikat dengan adanya peraturan ataupun komitmen yang mengatur segala tingkah laku setiap aktor. Yang *kedua* adalah ketelitian yang diperlukan agar tidak terjadi kerancuan dalam segala peraturan yang ada sehingga dalam rezim diperlukan adanya *require, authorize*, atau *proscribe*. Yang *ketiga* adalah delegasi yang diartikan sebagai orang ketiga yang dapat melaksanakan kewenangan dalam mengimplementasikan, mentafsirkan, dan juga mengaplikasikan aturan-aturan. Dengan adanya ketiga hal tersebut yang berdasarkan atas *interest based* yang memberikan keuntungan untuk negara yang berupa pencapaian dari *interest* suatu negara tersebut akan tercapai disebabkan kepatuhan dari para anggota yang tidak akan melanggar dikarenakan rezim yang diikuti tersebut adalah alat yang digunakan untuk mendapatkan *absolute gain (*Abbot et al, 2000:401-3*).*

2.1.3 Ekonomi Politik Internasional

Dalam studi hubungan Internasional ekonomi politik internasional tidak bisa lagi di kesampingkan sebagaimana yang diungkap oleh Keohane dan Nye Hubungan Internasional tidak bisa lagi dipahami sebagai kompetisi geo-strategi diantara negara untuk mencari kekuasaan. Isu–isu ekonomi, saluran baru komunikasi, sarana kerjasama telah melahirkan politik dunia baru dimana ekonomi politik internasional dan institusi internasional memainkan peran penting (Baylis, 2001:283).

Dalam bukunya Rantai Kapitalisme Global Bonnie Setiawan mendefini sikan ekonomi politik sebagai berikut:

> Ekonomi politik internasional adalah kajian yang berusaha mengenali hubungan yang komplek antara berbagai disiplin sub bidang di dalam ilmu politik maupun ekonomi, dan menjadi sub bidang dalam teori Hubungan Internasional.

Secara empiris dapat kita lihat kajian ekonomi politik internasional tidak dapat dilepaskan dari permasalahan yang berkaitan dengan masalah perdagangan terutama negosiasi WTO. Selain itu juga berkaitan dengan peran MNC *(Multinational Corporations*) dan lain- lain, sebagai aktor penting dalam ekonomi politik internasional.

Robert Gilpin menyatakan bahwa inti dari ekonomi politik adalah suatu hubungan kompleks dalam konteks Hubungan Internasional antara politik dan ekonomi, antara negara dan pasar. Dimana menurutnya ekonomi adalah untuk mencapai kekayaan, sementara politik adalah tentang pencapaian kekuatan, keduanya berinteraksi dengan rumit (Jackson & Sorensen, 2007:228).

2.1.4 Liberalisme Ekonomi

Menurut pandangan liberal ekonomi politik cenderung bersifat ekonomistis. Menurut pandangan ini EPI adalah bagian dari penerapan atau aplikasi teori dan metodologi ilmu ekonomi ke dalam setingan internasional (Bakry, 2015:29).

Pemikiran liberalisme ekonomi adalah salah satu pendekatan dalam ekonomi politik internasional. Menurut Robert Gilpin ada beberapa varian pemikiran atau mazhab liberal yaitu liberal klasik, keynesian dll, sementara Robert Jackson dan George Sorensen membagi persfektif liberalisme ke dalam liberalisme Sosiologi, liberalisme interdependensi, liberalisme Institusional dan liberalisme Republikan. Pada posisi peneliti menekankan pada liberalisme klasik untuk penjelasan yang lebih menekankan pada perdagangan bebas. Liberalisme klasik erat kaitannya Adam Smith dan David Ricardo. Yang menekankan pada

individu dan menginginkan hilangnya peran negara. Hal-hal yang di tekankan oleh pemikiran liberal adalah kebebasan, hak individu dan pasar bebas.

Dalam pandangan liberalis pertukaran ekonomi di pasar bersifat *Positif Sum Game*. Hal tersebut dapat di lihat dalam Tabel 2.1

Tabel 2.1

Paradigma Liberalis

Hubungan Antara Ekonomi dan Politik	**Ekonomi Otonom**
Aktor utama	Individu dan perusahaan swasta
Sifat hubungan	Kooperatif, *positif sume game*
Tujuan ekonomis	Kesejahteraan maksimun individu dan sosial

Sumber: Robert jakson dan George Sorensen 2007:238.

2.1.4.1 Perdagangan Bebas

Menurut Adam Smith, pasar dan mekanisme harga merupakan sebuah sarana yang paling tepat untuk kegiatan ekonomi domestik maupun internasional. Smith menekankan bahwa semua keputusan ekonomi harus dibuat oleh pasar. negara harus semaksimal mungkin keluar dari perdagangan internasional maupun dari ekonomi domestik (Jackson&Sorensen, 2007:30).

Menurut Smith seorang tokoh liberal klasik menyatakan bahwa masyarakat terdiri dari individu–individu dengan memiliki kecenderungan bawaan tukar menukar barang barter dan berdagang demi mengejar kepentingan pribadi (Burchill dan Linklater, 2015:60). Smith sebagai bapak liberalisme ekonomi menyatakan bahwa pemerintah tidak boleh ikut campur dalam urusan

ekonomi, menurut Smith prekonomian pasar harus dibiarkan berjalan sendiri. Selain itu menurutnya ekonomi pasar adalah sumber utama kemajuan, kerjasama dan kesejahteraan (Jackson dan Sorensen, 2007:253).

Smith meyakini bahwa pasar yang beroprasi bebas berdasarkan pada pembagian tenaga kerja akan memaksimalkan efisiensi dan kemakmuran sehingga hal ini akan menghasilkan kerjasama yang menguntungkan atau *positif sum game* (Winarno, 2011:38). Hal ini di pertegas oleh David Ricardo yang menyatakan pentingnya perdagangan bebas dalam arena hubungan internasional dengan adanya perdagangan bebas akan membuat negara menjadi efisien, menurutnya efisiensi merupakan salah satu nilai liberalisme yang kualitasnya sama dengan kebebasan. Efisiensi akan tercapai apabila negara menjalankan prinsip keunggulan komparatif dimana dalam konteks ini setiap negara menspesialisasikan diri untuk memproduksi barang dan jasa yang paling efisien saja. Dengan menjalankan hal ini maka akan terciptanya timbal balik. Ricardo memandang pasar internasional yang bebas akan menstimulus industri, munculnya inovasi dan terciptanya keutungan bersama melalui peningkatan produksi (Bakry, 2015:33).

Dalam pandangan liberalis semua negara akan dapat memperoleh keuntungan dari berkembangnya pasar global melalui pengembangan perdagangan bebas dan pembagian tenaga kerja.

Sementara Robert Gilpin mengatakan :

> perdagangan bebas cenderung menciptakan perdamaian dunia karena saling ketergantungan ekonomi dapat menciptakan hubungan hubungan positif antar bangsa yang pada gilirannya mengembangkan harmoni kepentingan (Hadiwinata, 2006:28).

2.1.5 Merkantilisme

Merkantilisme adalah dokrin atau pemikiran yang lahir pada era pembentukan negara berdaulat dan modern sepanjang abad ke 16 dan 17. merkantilisme adalah suatu pandangan dunia tentang elit-elit politik yang berada pada garis depan pembangunan negara modern (Jackson & Sorensen, 2009:231).

Dalam pandangan merkantilisme negara adalah aktor utama dalam arena hubungan internasional. Merkantilis melihat hubungan internasional khususnya ekonomi dan politik internasional adalah arena konflik sehingga menurut pandangan merkantilisme politik sangat menetukan dalam kegiatan ekonomi, merkantilis melihat arena hubungan internasional adalah *Zero Sum Game*. Dimana tujuan dari hubungan internasional khususnya ekonomi dan politik internasional adalah negara yang kuat (Jackson & Sorensen, 2009:233). Hal tersebut dapat di lihat dalam Tabel 2.2.

Tabel 2.2

Paradigma Merkantilisme

Hubungan Antara Ekonomi dan Politik	**Politik Menentukan**
Aktor utama	Negara
Sifat hubungan	konflliktual, *Zero sume game*
Tujuan ekonomis	Kekuatan negara

Sumber: Robert Jakson dan George Sorensen 2007:235.

Dalam pandangan merkantilis perdagangan internasional adalah alat pital negara. Secara prinsip teori perdagangan merkantilis menekannkan pada kontrol negara dan proteksi ekonomi nasional terhadap perdagangan internasional. Dalam hal ini perdagangan dan secara umum prekonomian nasional tidak boleh lepas dari kontrol negara. Negara sangat dibutuhkan dalam mengendalikan arus barang dan faktor modal dari negara lain. Dalam hal ini mekanisme perdagangan harus berlandaskan pada kebijakan pemerintah (Bakry, 2015:113).

2.1.5.1 Proteksionisme

Tokoh pendukung Proteksionisme yaitu Friedrich List dan Alexander Hamilton. List berpijak pada paham liberal, dimana dia mengakui bahwa kebijakan ekonomi liberal dapat bekerja di sebuah negara. List mencontohkan negara Inggris. Dimana menurutnya kebijakan ekonomi liberal dapat di jalankan oleh Inggris. Tetapi menurutnya jika negara-negara ingin seperti Inggris terutama negara membagun harus menjalankan kebijakan yang berbeda (Bakry, 2015:116).

List berargumen kesejahteraan individu merupakan tanggung jawab individu sendiri. Dalam konteks negara, pencapaian kemakmuran suatu negara tidak bergantung pada kemakmuran negara lain, melainkan pada usahanya sendiri. Inggris sebagai sebuah negara merdeka dan berdaulat sah saja bagi Inggris untuk meletakan kepentingan nasionalnnya sebagai landasan kebijakan ekonominya. Maka dapat dipahami menurut List jika melalui bahasa, peraturan dan kekuasaan yang di milikinya Inggris berusaha membakukan sistem pasar bebas agar dapat membuka pasar negara-negara lain untuk menerima produk manufaktur yang dihasilkannya (Hadiwinata, 2006:59).

Sementara menurut Alexander Hamilton negara harus berperan aktif dalam mengembangkan sistem produksi terutama dalam sistem perdagangan internasional yang dapat merugikan kepentingan nasional. Hamilton memberikan rekomendasi yang meliputi beberapa hal Sebagai berikut :

1. Negara harus menerapkan (*Protecting Doeties)* tarif impor bagi produk-produk asing yang di khawatirkan dapat membunuh industri dalam negeri, khususnya barang-barang manufaktur yang di produksi oleh negara-negara pesaing.
2. Negara harus berani melakukan (*Prohibitions of Rival Articles)* pelarangan impor bagi produk-produk negara pesaing. Hal ini di perlukan untuk menghidupkan industri di dalam negeri.
3. Negara harus mampu melakukan (*Prohibition of the Exportation of Materials of Manufactures)* pelarangan expor produk manufaktur, terutama terutama di sektor-sektor dimana negara dapat memproduksinya secara murah dari negara lain. Tujuan kebijakan ini adalah untuk menghemat sekaligus membatasi *(entry)* bagi negara lain di dalam segmen produk tertentu.
4. Negara hendaknya menerapkan (*judicious regulations for the infection of manufactured commodities)* peraturan hukum yang mengatur pengecekan komoditas manufaktur. Peraturan ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan kualitas produk kepada konsumen dan menghindari kemungkinan penyelundupan. Dengan peraturan ini, maka mereka yang sengaja menghidari tarif impor dapat diberi sanksi hukum (Hadiwinata, 2002:58).

Menurut Bob Sugeng Hadiwinata 4 poin inilah yang paling relevan dengan isu perdagangan internasional dari 11 poin yang di kemukakan oleh Hamilton.

Menurut Neil Vousden proteksionisme diartikan sebagai sebuah kebijakan ekonomi untuk membatasi perdagangan antar negara melalui hambatan tarif atas barang-barang impor, pembatasan kuota dan berbagai regulasi pemerintah yang dirancang untuk melindungi barang dan jasa yang di produksi dalam negeri. Pada masa lalu proteksi di lakukan dengan tarif yang tinggi terhadap barang–barang impor, Hal inilah yang membuat terbentuknya kesepakan GATT yaitu untuk menghidari terjadinya hambatan terhadap perdagangan internasional. Termasuk pada masa perdagangan modern saat ini masih terjadi kebijakan proteksi yaitu neo-proteksionisme yaitu di berlakukannya hambatan perdagangan yang sifatnya non-tarif (Bakry, 2015:119).

Adapun kebijakan-kebijakan yang digolongkan *non-tarif barier* adalah sebagai berikut:

1. Insentif pajak (*tax insentive)* atas produk-produk domestik. Biasanya produk dari negara lain dapat membanjiri negara tertentu karena harganya murah. Produk tersebut bisa dijual murah karena keunggulan teknologi yang di milikinya.
2. Pembatasan impor *(quota restrictions).* Yaitu suatu kebijakan proteksi dengan cara barang-barang yang datang dari negara lain dibatasi.
3. Subsidi ekspor *(export subsidies).* Adalah subsidi yang diberikan pemerintah terhadap produsen barang-barang tertentu sehingga biaya produksi terhadap

produk tersebut menjadi rendah dan memiliki daya saing yang tinggi jika dijual di pasar internasional.

4. Manipulasi nilai tukar *(exchange rates manipulations).* Pemerintah dalam suatu negara dapat melakukan intervensi pasar valuta asing untuk menurunkan nilai mata uangnya dengan menjual mata uangnya divaluta asing. Kebijakan ini akan meningkatkan biaya impor dan menurunka biaya ekspor.
5. Isu lingkungan *(ecolabelin*g). Isu ini sering menjadi perhatian oleh negara maju. Hal ini dilakukan untuk memproteksi produk-produk penetrasi dari negara berkembang.
6. Kemudahan kredit *(credit facilities),* dumping dan regulasi. Hal ini di maksudkan untuk memberikan jaminan atau kemudah kredit dan untuk memperlancar proses produksi sehingga daya saingnya terhadap produk negara lain mengikat. Sementara dumping tujuannnya adalah strategi untuk menguasai pasar di luar negeri dengan cara menjual produk ke negara itu dengan harga di bawah harga yang berlaku di negara asalnya. Sementara proteksi melalui regulasi adalah dengan memberlakukan kebijakan-kebijakan perdagangan (khususnya) kebijakan impor yang di tunjukan untuk "Mempersulit" komoditas dari negara lain masuk pasar negaranya (Bakry, 2015:120).

2.2 Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ini tentu dibutuhkan kerangka pemikiran agar dapat dilihat apa dan bagaimana penelitian yang diangkat dapat tergambarkan terutama

berkaitan dengan hubungan antara variabel penelitian dan penerapan konsep atau teori yang diangkat ke dalam masalah penelitian. Hubungan internasional sebagai salah satu kajian yang interdisipliner mengkaji berbagai fenomena sosial. Ekonomi politik adalah salah satu bagian dari pembahasan kompleks antara hubungan ekonomi dan politik.

Dalam penelitian ini peneliti menetapkan unit analisa keberlangsungan rezim perdagangan bebas WTO yang mengarah pada liberalisasi perdagangan. Teori Rezim internasional akan membantu peneliti untuk menjelaskan rezim perdagangan bebas terutama berkaitan dengan perundingan dan kesepakatan yang diatur dalam putaran -putaran perundingan negosiasi WTO, yaitu kesepakatan pengurangan tarif perdagangan secara bertahap, sementara berkaitan dengan pembanguan rezim ada 4 elemen dasar di antaranya prinsip, Menurut Sood ada beberapa prinsip dari perdagangan internasional yang diatur dalam WTO. Yaitu prinsip non-diskriminasi, prinsip resiporitas, prinsip penghapusan hambatan kuantitatif, prinsip perdagangan yang adil dan prinsip tarif mengikat. Merujuk pada hal diatas WTO sebagai rezim perdagangan internasional mempunyai prinsip non-diskriminasi, meliputi *most favoured nation* dan prinsip *national treatment*. Dalam prinsip *most favoured nation* semua negara anggota harus memberi perlakuan yang sama dalam pelaksanaan kebijakan impor dan ekspor. Berikutnya adalah prinsip *nasional treatment* dalam prinsip ini tidak menghendaki adanya diskriminasi antar produk dalam negeri dengan produk serupa di luar negeri dan berikutnya *prinsip resiporitas,* dalam prinsip ini setiap negara harus melaksanakan kebijaksanaan internasional artinya apabila negara menurunkan tarif masuk atas

produk impor disuatu negara maka negara pengekspor produk tersebut wajib juga menurunkan tarif masuk untuk produk dari negara yang pertama. Prinsip lainnya adalah prinsip penghapusan hambatan kuantitatif, prinsip perdagangan yang adil dan prinsip tarif mengikat. Ketigan prinsip tersebut masing-masing menekankan hambatan yang berkaitan dengan kuota dan pembatasan ekspor. Berikutnya melarang dumping dan subsidi. Dan terahir adalah anggota WTO harus mematuhi berapapun besarnya tarif yang telah disepakati.

Berikutnya berkaitan dengan aturan. Dalam konteks ini rezim perdagangan WTO mengatur masalah tarif dalam setiap perundingan dan pada putaran Doha salah satunya mengatur berkaitan liberalisasi di bidang pertanian.

Dalam penelitian ini peneliti lebih memahami rezim sebagai tumpang tindih, dalam arti rezim dan organisasi internasional digunakan secara bergantian dimana berbicara berkaitan dengan rezim hanya membahas isu-isu tertentu tetapi organisasi internasional memiliki kapasitas untuk bereaksi dan bertindak atas isu-isu tertentu tanpa organisasi intenasional rezim tidak dapat beroprasi dan hal ini menjadi salah satu representasi dari WTO.

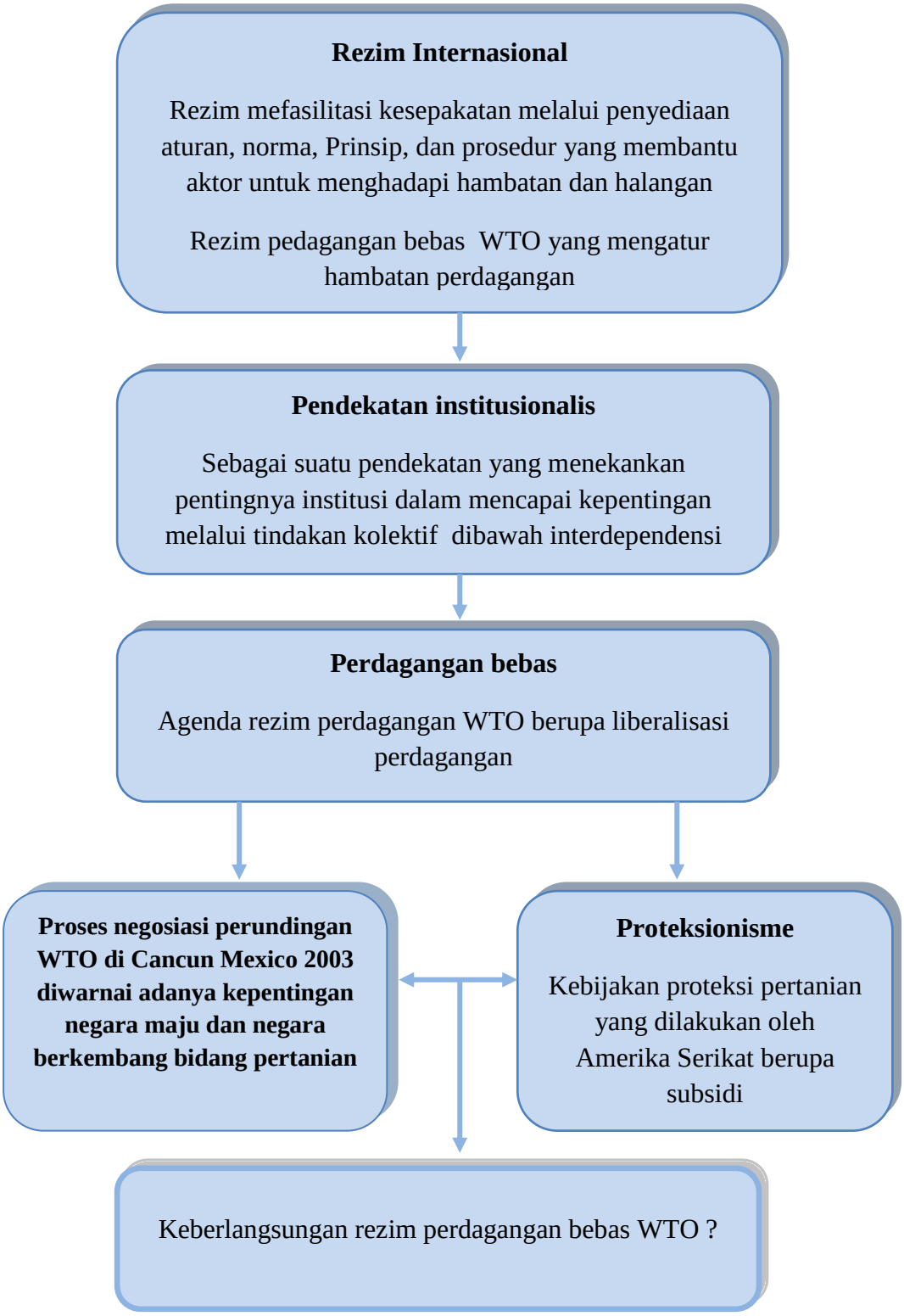
Dalam penelitian ini peneliti memilih pendekatan institusionalis sebagai pendekatan untuk memahami keberlangsungan perdagangan bebas WTO. Dimana dalam hal ini rezim dapat mencapai tujuan-tujuan dari para aktor dalam mengahadapi tantangan dan dilema dan kordinasi, kolaborasi dibawah interdependensi. Dalam paparan diatas ada argumen pokok berkaitan dengan pendekatan institusionalis. Pertama, dengan semakin tinggi interdependensi semakin tinggi pula tuntutan untuk melakukan kerjasama, dalam hal ini negara

akan mampu memberikan solusi terhadap berbagai permasalahan secara bersama. Maka dibentuklah norma, aturan dan institusi-institusi, merujuk pada paparan tersebut terbentuknya kesepakatan – kesepakatan didalam perundingan rezim perdagangan bebas WTO adalah mengarah kepada kerjasama yang dilakukan dan mengarah kepada berbagai permasalahan yang dihadapi dalam perdagangan internasional berupa proteksi, sehingga bagaiman cara mengurangi hambatan-hambatan perdagangan melalui perundingan-perundingan yang dilakukan. Berikutnya berkaitan dengan keberadaan insitusi-institusi yang begitu penting karena akan mampu memberikan keuntungan dan pengaruh terhadap aktor lain, hal inilah yang mendorong rezim perdagangan WTO untuk dilakukan kesepakatan berkaitan dengan pengurangan biaya transaksi terkait dengan isu-isu yang di hadapi seperti berkaitan dengan masalah pengurangan tarif di bidang pertanian.

Sementara ada 3 komponen karakteristik rezim sebagaimana yang di ungkap dalam tinjauan puskata, dalam hal ini *rezim perdagangan bebas WTO mengatur bagi para anggotanya untuk mengurangi hambatan-hambatan di bidang pertanian yang harus ditaati. Selain itu juga rezim perdagangan bebas WTO membuat larangan dan mengizinkan berkaitan dengan aturan yang dibuat misalakan pada putaran Doha memberi mandat bahwa negara miskin tidak* diminta melakukan penurunan tarif pertanian apapun, dan terahir terbutuknya WTO sebagai sebuah organisasi adalah sebagai salah satu melaksanakan kewenangan dalam mengimplementasikan, mentafsirkan, dan juga mengapli-kasikan aturan-aturan.

Sementara konsep perdagangan bebas yang diungkap oleh Smith berkaitan dengan tidak bolehnya negara terlibat dalam prekonomian. Karena menurutnya dengan tidak ikut campurnya negara dalam urusan ekonomi akan menghasilkan kemajuan, kerjasama dan kesejahteraan. Konsep ini merujuk pada rezim WTO yang mempunyai keinginan untuk memangkas hambatan-hambatan dalam perdagangan internasional atau liberalisasi perdagangan.

Sementara Amerika Serikat dalam fenomena yang diungkap, menerapkan kebijakan proteksi terhadap sektor pertanian negaranya. Kebijakan proteksi merujuk pada paparan teoritis diatas, ada beberapa hal yang dilakukan oleh Amerika Serikat dalam kebijakan pertanian yaitu memberikan subsidi bagi petani, selain itu juga apa di kemukakan oleh List, Amerika Serikat berpijak pada paham liberal tetapi kepentingan nasional menjadi faktor utama dalam kebijakan pertanian Amerika Serikat. Dalam hal ini Amerika Serikat mengulang apa yang telah diterapkan oleh pemimpin Amerika Serikat ketika itu Alexander Hamilton, yaitu negara harus berperan aktif dalam mengembangkan sistem produksi terutama dalam sistem perdagangan internasional yang dapat merugikan kepentingan nasional. Selain itu apa yang dilakukan oleh Amerika Serikat bertentangan dengan tujuan dari rezim perdagangan bebas WTO yang mengarah pada liberalisasi perdagangan sehingga dalam hal ini teori proteksionisme sebagai bagian dari merkantilis menjadi konsep yang dipilih untuk menjelaskan proteksi pertanian Amerika Serikat. Dengan demikian dapat tergambar kerangka pemikiran dalam bagan 2.2 berikut ini :



Bagan 2.1 Kerangka Pemikiran